

## STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN LUAS PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (Studi empiris pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

Yoseph Dimas Edo Perwira, Paulus Basuki Hadiprajitno<sup>1</sup>

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

### ABSTRACT

*This study examines the effects of corporate governance structures to the size of corporate social responsibility disclosure in a firm's annual reports. This size of corporate social responsibility disclosure includes environment, energy, employee's health and safety, employee's other needs, products, community involvement, and others. Previous research review show that there is no consistency and give many variety results. This study attempts to examine it with 7 independent variables (4 research variables and 3 control variables). These variables are independent commissioner, audit committee, public ownership, foreign ownership, profitability, leverage, and firm's size. Sample that used in this study was extracted with using purposive sampling method. The population is 57 basic and chemical industry firms that listed in Indonesian Stock Exchange (IDX). Research periods are 2010 and 2011. After reduces with several criteria, 37 firms are determined as firms samples and 68 annual reports as research samples. The analysis technique in this study uses a multiple regression analysis with help from a program named SPSS. The result indicates that no research variables show any significant effects because the structures of corporate governance in Indonesia aren't implemented effectively. Leverage and firm's size as control variables have significant effects to the size of Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure in a firm's annual reports.*

**Keywords** : Stakeholder theory, legitimacy theory, agency theory, corporate governance, size of Corporate Social Responsibility (CSR), independent commissioner, audit committee, public ownership, foreign ownership

### PENDAHULUAN

Tata kelola perusahaan saat ini merupakan hal yang penting dan banyak dilakukan oleh berbagai perusahaan di Indonesia. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan di Indonesia yaitu Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia yang dibuat oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2006. Dahya (dalam Khan, 2010) berpendapat bahwa tata kelola perusahaan digunakan sebagai cara untuk mengendalikan perusahaan agar bertanggungjawab atas arah perusahaan kepada stakeholder. Maier (dalam Khan, 2010) menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan manajemen perusahaan, dewan komisaris, penanam saham, dan stakeholder lain. Claessens (dalam Khan, 2010) juga memberikan penjelasan bahwa tata kelola perusahaan adalah usaha untuk menjaga keseimbangan antara tujuan ekonomi dan tujuan sosial atau antara tujuan individu dan tujuan kelompok. Khan (2010) menyatakan tata kelola perusahaan adalah proses para dewan dan auditor mengelola tanggung jawab mereka kepada penanam modal dan stakeholder lain. McLaren (dalam Khan, 2010) menjelaskan bahwa tanggung jawab yang diberikan

<sup>1</sup>Corresponding author

perusahaan kepada *stakeholder* disebabkan karena perusahaan bergantung pada sumber daya yang dimiliki *stakeholder*.

Teori legitimasi sering dipakai oleh para peneliti untuk menjelaskan hubungan antara tata kelola perusahaan dengan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Sethi (dalam Khan *et al*, 2012) berpendapat bahwa *legitimacy gap* bisa timbul jika ada perbedaan antara nilai perusahaan dan nilai sosial. Ini bisa membahayakan legitimasi perusahaan di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, Khan *et al* (2012) berkesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan mengungkapkannya secara bertanggung jawab kepada para *stakeholder* perlu dilakukan untuk mengurangi *legitimacy gap*. Ini bertujuan agar organisasi mendapatkan dukungan dari *stakeholder* dan bisa melanjutkan aktivitasnya selama organisasi memberikan manfaat dan tidak berbahaya. Struktur tata kelola perusahaan seperti kepemilikan dan komposisi dewan mempunyai peran vital untuk mengurangi *legitimacy gap*.

Penelitian tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sudah banyak dilakukan oleh banyak peneliti baik dari dalam negeri maupun luar negeri seperti penelitian dari Sembiring (2005), Novita *et al* (2008), Khan (2010), Mulia (2010), Mardi (2010), Sinaga (2011), Ratnasari (2011) dan Khan *et al* (2012). Hasil dari penelitian-penelitian itu bermacam-macam dan cenderung tidak konsisten. Siregar dan Utama (dikutip oleh Hadiprajitno, 2012) menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan di Bursa Efek Indonesia tidak konsisten pengaruhnya karena mekanisme tata kelola perusahaan di Indonesia masih baru pasca krisis 1997 sehingga belum optimum hasilnya.

Ketidakkonsistenan hasil beberapa penelitian baik dari luar negeri dengan dalam negeri itu dan kurangnya penelitian di Indonesia tentang pengaruh struktur kepemilikan publik membuat realita pelaksanaan struktur tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan tidak sesuai teori yang sudah ada. mendorong adanya penelitian ini untuk mengetahui pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada suatu industri yang lebih spesifik. Penelitian ini ditetapkan untuk memakai perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel penelitian karena laporan tahunan perusahaan yang *go public* itu lebih mudah didapat dan merupakan bagian dari kelompok perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia yang berhadapan langsung dengan lingkungan sehingga wajib melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan melaporkannya sesuai dengan PP Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Faktor-faktor lain yang melekat dengan karakteristik perusahaan yang mempengaruhi luas pengungkapan tetapi bukan tujuan dari penelitian ini dimasukkan sebagai variabel kontrol yaitu profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Tiga variabel kontrol ini dipakai karena sudah banyak dipakai untuk meneliti pengaruh tata kelola perusahaan dengan luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan mampu menggambarkan kondisi keuangan perusahaan.

## KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### **Teori Stakeholder**

Ghozali dan Chariri (2007) berkesimpulan dalam teori *stakeholder* bahwa perusahaan bukanlah entitas yang beroperasi untuk kepentingannya sendiri tetapi harus memberikan manfaat kepada *stakeholdernya* (pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, pemerintah, dan masyarakat). Keberadaan perusahaan itu tergantung oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholdernya*.

Solomon (2007) menyatakan bahwa teori *stakeholder* merupakan suatu gagasan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan menjadi aktif untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan untuk memuaskan kepentingan dari seluruh *stakeholder*. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan citra perusahaan agar perusahaan terus mendapat dukungan dari *stakeholdernya*. Ullman (dalam Ghozali dan Chariri, 2007) memberikan pendapat bahwa perusahaan melakukan berbagai cara untuk mencari perhatian dan mengendalikan *stakeholdernya* dengan strategi yang diadopsi perusahaan. Strategi itu terdiri dari dua macam, yaitu strategi aktif dan pasif. Strategi aktif merupakan strategi untuk terus memonitor dan berusaha mempengaruhi *stakeholder* yang dipandang berpengaruh/penting. Strategi pasif merupakan strategi yang cenderung tidak terus menerus memonitor dan mempengaruhi *stakeholder* dan secara sengaja tidak berusaha untuk menarik perhatian dari *stakeholder*. Kurangnya perhatian kepada *stakeholder* mengakibatkan rendahnya tingkat pengungkapan informasi sosial dan kinerja sosial perusahaan. Kesimpulan dari uraian-uraian itu adalah perusahaan tidak hidup sendiri dan akan terus berhubungan dengan *stakeholdernya*. Kemampuan perusahaan untuk menarik perhatian dari *stakeholder* bisa membuat *stakeholder* memberikan dukungan kepada perusahaan. Hal yang bisa dilakukan untuk menarik perhatian dari *stakeholder* adalah dengan melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

### **Teori Legitimasi**

Teori legitimasi menjelaskan hubungan perusahaan dengan masyarakat. Dowling dan Pfeffer (dalam Ghozali dan Chariri, 2007) menjelaskan bahwa perusahaan berusaha untuk menciptakan keselarasan antara nilai-nilai perusahaan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dimana perusahaan merupakan bagian di dalamnya. Jika nilai-nilai dari perusahaan dan masyarakat selaras, legitimasi perusahaan atau pengesahan keberadaan perusahaan di dalam masyarakat bisa tercapai. Jika perusahaan tidak bisa menyesuaikan diri dengan nilai-nilai masyarakat, keberadaan dan pengesahan perusahaan bisa terancam.

Khan *et al* (2012) juga menjelaskan bahwa teori legitimasi biasanya digunakan untuk menjelaskan motivasi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Khan *et al* menambahkan motivasi perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah untuk mendapatkan dukungan dari *stakeholder* dan bisa melanjutkan aktivitasnya selama organisasi

memberikan manfaat dan tidak berbahaya seperti mengelola limbah berbahaya, mengurangi dampak polusi, dan mensejahterakan warga sekitar pabrik.

Kesimpulan dari dua paragraf sebelumnya adalah perusahaan perlu menyesuaikan nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai di masyarakat agar memperoleh legitimasi atau pengesahan dari masyarakat. Legitimasi itu berguna agar perusahaan mendapatkan dukungan dari stakeholder dan bisa melanjutkan aktivitasnya.

### **Teori Agensi**

Teori Agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal (Hendriksen, 2002). Agen mempunyai kontrak untuk melaksanakan tanggung jawab tertentu dan melaporkannya kepada prinsipal sedangkan prinsipal mempunyai kontrak untuk memberi upah kepada agen. Prinsipal disebut sebagai penilai informasi sedangkan agen disebut sebagai pembuat keputusan. Penilai informasi bertanggungjawab untuk memilih sistem informasi yang bisa digunakan oleh pembuat keputusan untuk membuat keputusan yang terbaik untuk kepentingan pemilik perusahaan dari sudut keberadaan informasi untuk mereka.

Hendriksen menjelaskan bahwa hal yang timbul dari adanya teori agensi adalah ketidaklengkapan informasi yang diberikan kepada prinsipal. Ketidaklengkapan informasi ini disebut sebagai *information asymmetries*. Contohnya adalah pemilik bisa tidak tahu keputusan yang diambil oleh manajer dengan jelas. Ini yang membuat mereka kesulitan untuk menghitung upah dan bonus kepada manajer karena pemilik perusahaan tidak bisa mengamati semua kegiatan yang dilakukan oleh manajer dan prestasi yang didapat manajer. Kegiatan yang dilakukan oleh manajer mungkin berbeda dengan keputusan yang sudah ditentukan oleh pemilik karena manajer mempunyai rancangan pilihan tersendiri atau mungkin manajer ingin mencurangi pemilik perusahaan lewat informasi yang diberikan ke pemilik perusahaan.

Akhtaruddin (dalam Mulia, 2010) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan menyediakan kerangka pengendalian internal yang bisa mengurangi masalah agensi ini. Tata kelola perusahaan dianggap mampu mengatasi masalah keagenan karena dengan pengawasan yang intensif terhadap perilaku oportunistik manajer dan kecenderungan untuk menutup-nutupi informasi untuk kepentingan mereka sendiri. Hal yang dapat disimpulkan adalah manajer bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan yang dimiliki pemilik perusahaan dan bertanggung jawab atas pelaporannya. Potensi yang timbul adalah kecurangan manajer dalam melaporkan laporan kegiatan perusahaan. Tata kelola perusahaan mempunyai peran untuk mengurangi potensi kecurangan manajer ini.

### **Hipotesis**

#### **Komisaris Independen dan Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Akhtaruddin (dalam Mulia, 2010) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan menyediakan kerangka pengendalian internal yang bisa mengurangi masalah dalam teori agensi. Tata kelola perusahaan dianggap mampu mengatasi masalah keagenan karena ada pengawasan yang intensif terhadap perilaku oportunistik manajer dan kecenderungan untuk menutup-nutupi informasi untuk

kepentingan mereka sendiri. KNKG dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia memberikan definisi komisaris yaitu bagian dalam perusahaan yang berfungsi dan bertanggung jawab untuk mengawasi dan menyediakan saran kepada dewan direksi dan memastikan perusahaan melaksanakan praktek tata kelola perusahaan. KNKG menjelaskan komisaris independen mempunyai tugas untuk menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Khan *et al* (2012) berkesimpulan bahwa komisaris independen berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Khan (2010) berkesimpulan bahwa komisaris independen berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan karena komisaris independen memberikan tekanan yang lebih kepada perusahaan untuk melaporkan kegiatan sosial agar ada keselarasan antara nilai perusahaan dan nilai sosial. Hasil berbeda didapat dalam penelitian Mulia (2010), Mardi (2010), Ratnasari (2011) dan Sinaga (2011) yang berkesimpulan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan. Mulia (2010) berkesimpulan komisaris independen tidak mempengaruhi pengambilan keputusan karena mereka tidak terlibat dalam operasional perusahaan dan tidak mempunyai kualifikasi yang memadai sebagai komisaris.

Ketidakkonsistenan dari penelitian-penelitian sebelumnya menyebabkan penelitian ini mempunyai hipotesis pertama sebagai berikut:

H1 : Komisaris independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

### **Komite Audit dan Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Akhtaruddin (dalam Mulia, 2010) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan menyediakan kerangka pengendalian internal yang bisa mengurangi masalah dalam teori agensi. Tata kelola perusahaan dianggap mampu mengatasi masalah keagenan karena ada pengawasan yang intensif terhadap perilaku oportunistik manajer dan kecenderungan untuk menutup-nutupi informasi untuk kepentingan mereka sendiri. KNKG dalam Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia memberikan penjelasan bahwa salah satu fungsi komite audit sebagai bagian dalam perusahaan adalah membantu dewan komisaris memastikan struktur pengendalian internal sudah cukup dan efektif. Coley Jr *et al* (dalam Hadiprajitno, 2012) menjelaskan bahwa komite audit merupakan komite yang kritis dan banyak otoritas pengawasan pasar modal dunia mengharuskan perusahaan memilikinya. Coley Jr *et al* menambahkan komite ini bertujuan untuk membantu fungsi pengawasan dewan komisaris.

Khan *et al* (2012) berkesimpulan komite audit mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan karena komite audit berusaha memberikan saran terbaik untuk dewan komisaris dalam menyelaraskan nilai perusahaan dan nilai sosial pada perusahaan-perusahaan di Bangladesh. Hasil berbeda dikemukakan oleh Sinaga (2011) dan Ratnasari (2011) bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan publik di Indonesia. Sinaga (2011) menjelaskan bahwa komite

audit menjadi tidak berpengaruh karena tidak dapat menjalankan tugas dengan semestinya dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan dengan menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan.

Ketidakkonsistenan dari penelitian-penelitian sebelumnya menyebabkan penelitian ini mempunyai hipotesis kedua sebagai berikut:

H2 : Komite audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

### **Kepemilikan Publik dan Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Solomon (2007) menyatakan bahwa teori *stakeholder* merupakan suatu gagasan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan menjadi aktif untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan untuk memuaskan kepentingan dari seluruh *stakeholder*. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan citra perusahaan agar perusahaan terus mendapat dukungan dari *stakeholdernya* melalui keputusan-keputusan yang diambil *stakeholder*. Peran RUPS diatur dalam Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia. RUPS merupakan organ di dalam perusahaan sebagai wadah dari para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting sesuai dengan modal yang ditanam. KNKG juga menjelaskan bahwa keputusan yang diambil oleh RUPS harus memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan atau *stakeholder*.

Khan *et al* (2012) menemukan hasil bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan sosial perusahaan karena mempunyai jumlah *stakeholder* yang semakin besar. Sobhan dan Werner (dalam Khan, 2012) memberikan hasil yang berbeda. Sobhan dan Werner beralasan bahwa biasanya publik kurang mengerti tentang laporan keuangan dan hanya mencari insentif yang jelas seperti dividen sehingga kebanyakan tidak datang saat rapat umum pemegang saham.

Ketidakkonsistenan dari penelitian-penelitian sebelumnya menyebabkan penelitian ini mempunyai hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3 : Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

### **Kepemilikan Asing dan Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Akhtaruddin (dalam Mulia, 2010) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan menyediakan kerangka pengendalian internal yang bisa mengurangi masalah dalam teori agensi. Tata kelola perusahaan dianggap mampu mengatasi masalah keagenan karena ada pengawasan yang intensif terhadap perilaku oportunistik manajer dan kecenderungan untuk menutup-nutupi informasi untuk kepentingan mereka sendiri. Khan *et al* (2012) menjelaskan perusahaan yang dimiliki oleh pihak asing cenderung memiliki pengetahuan dan nilai yang berbeda karena berasal dari pasar modal yang berbeda sehingga butuh informasi yang lebih banyak untuk pengambilan keputusan. Peran RUPS diatur dalam Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia. RUPS merupakan organ di dalam perusahaan sebagai wadah dari para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting

sesuai dengan modal yang ditanam. KNKG juga menjelaskan bahwa keputusan yang diambil oleh RUPS harus memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan atau *stakeholder*.

Khan *et al* (2012) menemukan hasil bahwa perusahaan yang mempunyai kepemilikan asing yang besar cenderung mengungkapkan laporan sosial lebih banyak. Tanimoto dan Suzuki (dalam Novita *et al*, 2008) membuktikan bahwa kepemilikan asing di perusahaan publik di Jepang menjadi faktor pendorong penggunaan GRI dalam pengungkapan sosial. Novita *et al* (2008), Mulia (2011), dan Mardi (2011) mendapatkan hasil yang berbeda yaitu kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Novita *et al* (2008) memberikan alasan bahwa kepemilikan asing pada perusahaan di Indonesia secara umum belum mepedulikan masalah lingkungan dan sosial sebagai isu kritis yang dianjurkan untuk diungkapkan dalam laporan tahunan.

Ketidakkonsistenan dari penelitian-penelitian sebelumnya menyebabkan penelitian ini mempunyai hipotesis keempat sebagai berikut:

H4 : Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

## **METODE PENELITIAN**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2011 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: (i) perusahaan publik (non-perbankan) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010-2011, (ii) Perusahaan yang menyajikan laporan informasi tanggung jawab sosial pada laporan tahunan tersebut, dan (iii) Perusahaan yang mempunyai laba positif pada tahun 2010 dan 2011. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### **Definisi dan Operasionalisasi Variabel**

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada laporan tahunan perusahaan dan diukur berdasarkan indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang disusun oleh Sembiring (2005) yang memaparkan tujuh kategori kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan industri manufaktur dengan total item adalah 78, yaitu lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat dan umum..

Metode yang digunakan untuk mengukur indeks yang telah dibentuk tersebut adalah dengan cara *content analysis* yaitu nilai 1 untuk setiap *item* yang diungkapkan serta 0 untuk *item* yang tidak diungkapkan dalam kategori-kategori yang sudah ditentukan (Novita *et al*, 2008). Khan (2010) menjelaskan tentang cara penghitungan indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada laporan tahunan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPCSR} = \frac{\text{Jumlah skor item pengungkapan yang diungkapkan}}{\text{Skor maksimum item pengungkapan}}$$

Keterangan:

IPCSR : Indeks Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)

Penelitian terdahulu tentang komisaris independen menemukan bahwa variabel komisaris independen dapat diukur dari proporsi komisaris independen terhadap total komisaris (Khan, 2012). Pada penelitian ini, komisaris independen dihitung dengan cara proporsi komisaris independen terhadap total komisaris di perusahaan yang diungkapkan di dalam laporan tahunan perusahaan.

Ratnasari (2012) pernah meneliti tentang komite audit dan berpendapat bahwa variabel komite audit dapat diukur dengan cara menghitung banyak anggota komite audit di suatu perusahaan. Pada penelitian ini, komite audit diukur dengan cara menghitung banyaknya anggota komite audit perusahaan yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan.

Khan (2012) berpendapat bahwa kepemilikan publik adalah total kepemilikan yang dimiliki oleh publik dan bukan dimiliki oleh pihak intern perusahaan. Kepemilikan publik dapat dihitung dengan cara proporsi kepemilikan publik yang dimiliki publik terhadap total saham. Pada penelitian ini, kepemilikan publik diukur dengan cara proporsi saham yang dimiliki publik terhadap total saham yang dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan.

Khan (2012) dalam meneliti tentang kepemilikan asing berpendapat bahwa kepemilikan publik adalah total kepemilikan yang dimiliki oleh investor asing yang menanamkan saham di suatu perusahaan. Kepemilikan asing dalam penelitian ini menggunakan persentase pemilikan saham asing yang dimiliki investor asing terhadap total saham dalam laporan tahunan perusahaan.

Variabel kontrol adalah variabel yang diperkirakan bisa memberikan pengaruh tetapi bukan merupakan dalam tujuan penelitian (Hadiprajitno, 2012). Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan. Tiga variabel kontrol ini dipakai karena sudah banyak dipakai untuk meneliti pengaruh tata kelola perusahaan dengan luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan mampu menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Penelitian Khan (2010) tentang faktor-faktor tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial memaparkan definisi operasional dari variabel kontrol profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Profitabilitas diukur dengan menggunakan rasio *return on equity* yaitu proporsi laba terhadap total modal. *Leverage* diukur dengan menggunakan *debt to equity ratio* yaitu proporsi total hutang terhadap total modal. Ukuran perusahaan diukur berdasarkan total aset perusahaan yang menggambarkan kekayaan perusahaan dan diubah dalam bentuk natural logaritma agar data yang didapat tidak terlalu besar. Ringkasan operasionalisasi variabel independen disajikan dalam tabel 1.



**Tabel 1**  
**Operasionalisasi Variabel Independen**

<b>Nama Variabel</b>	<b>Operasionalisasi Variabel</b>
Komisaris Independen	Proporsi komisaris independen terhadap total komisaris
Komite audit	Jumlah anggota komite audit perusahaan
Kepemilikan Publik	Proporsi kepemilikan saham yang dimiliki publik terhadap total saham
Kepemilikan Asing	Proporsi kepemilikan saham yang dimiliki investor asing terhadap total saham
Profitabilitas	Proporsi laba terhadap total modal
<i>Leverage</i>	proporsi total hutang terhadap total modal
Ukuran Perusahaan	natural logaritma total aset perusahaan

### **Analisis Statistik Deskriptif dan Analisis Regresi**

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai suatu variabel yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum (Ghozali, 2009). Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur kekuatan variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Model yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$IPCSR = \alpha + \beta_1KIN + \beta_2KAU + \beta_3PUB + \beta_4FOR + \beta_5ROE + \beta_6LEV + \beta_7SIZE + \varepsilon$$

Keterangan:

IPCSR : Indeks Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

$\alpha$  : Konstanta

$\beta$  : Koefisien regresi

KIN : Komisaris Independen

KAU : Komite Audit

PUB : Kepemilikan Publik

FOR : Kepemilikan Asing

ROE : Profitabilitas

LEV : *Leverage*

SIZE : Ukuran Perusahaan

$\varepsilon$  : *Error term*

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Setelah proses pengumpulan data dilakukan, diperoleh 34 perusahaan sebagai sampel perusahaan dengan 68 laporan tahunan sebagai sampel penelitian. Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai suatu variabel-variabel dalam penelitian yang dilihat dari nilai rata – rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan minimum. Gambaran statistik dari masing-masing variabel dalam penelitian disajikan dalam tabel 2.

**Tabel 2**  
**Hasil Statistik Deskriptif**

	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
IPCSR	68	0.01	0.60	0.2212	0.13838
KIN	68	0.20	1.00	0.4054	0.13716
KAU	68	2.00	5.00	3.1471	0.49670
PUB	68	0.02	0.59	0.2626	0.15950
FOR	68	0.00	0.93	0.3771	0.32496
ROE	68	0.00	0.70	0.1474	0.12604
LEV	68	0.13	4.32	1.1203	0.98027
SIZE	68	10.89	13.75	12.1591	0.71446
Valid N (Listwise)	68				

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2013

Hasil perhitungan statistik deskriptif atas variabel dependen luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan angka rata-rata sebesar 0,2212 dan standar deviasi sebesar 0,13838 yang berarti perusahaan sampel rata-rata mengungkapkan informasi sosial sebanyak 17 item pengungkapan pada laporan tahunan 2010 dan 2011 dan variasi luas pengungkapan tanggung jawab sosial berada di antara 6 dan 28 item. Hasil statistik menunjukkan nilai maksimum adalah 0,6 atau 47 item pengungkapan milik PT Semen Gresik Tbk pada tahun 2010 dan nilai minimum adalah 0,01 atau 1 item pengungkapan milik PT Alakasa Industrindo Tbk. pada tahun 2010.

Hasil statistik deskriptif atas variabel komisararis independen menunjukkan angka rata-rata sebesar 0,4054 dan standar deviasi 13716 yang berarti perusahaan sampel rata-rata mempunyai proporsi komisararis independen sebesar 40,54% pada laporan tahunan 2010 dan 2011 dan variasi proporsi komisararis independen berada di antara 26,824% dan 54,256%. Hasil statistik menunjukkan nilai maksimum adalah 1 milik PT Arwana Citra Mulia Tbk. pada tahun 2010 dan nilai minimum adalah 0,2 milik PT Semen Gresik Tbk pada tahun 2010.

Hasil perhitungan statistik deskriptif atas variabel independen komite audit menunjukkan angka rata-rata sebesar 3,1471 dan standar deviasi 0,4967 yang berarti perusahaan sampel rata-rata mempunyai komite audit sebesar 3 orang pada laporan tahunan 2010 dan 2011 dan variasi komite audit ada di 3 komite audit tiap perusahaan. Hasil statistik menunjukkan nilai maksimum adalah 5 milik PT Semen Gresik Tbk pada tahun 2010 dan nilai minimum adalah 2 milik PT Fajar Surya Wisesa Tbk. pada tahun 2010.

Hasil perhitungan statistik deskriptif atas variabel independen kepemilikan publik menunjukkan angka rata-rata sebesar 0,2626 dan standar deviasi 0,1595 yang berarti perusahaan sampel rata-rata mempunyai kepemilikan publik sebesar 26,26% pada laporan tahunan 2010 dan 2011 dan variasi proporsi kepemilikan publik berada di antara 10,31% dan 42,21%. Hasil statistik menunjukkan nilai maksimum adalah 0,59 milik PT Sierad Produce Tbk. pada tahun 2010 dan nilai minimum adalah 0,02 milik PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk. pada tahun 2010.

Hasil perhitungan statistik deskriptif atas variabel independen kepemilikan asing menunjukkan angka rata-rata sebesar 0,3771 dan standar deviasi 0,32496 yang berarti perusahaan sampel rata-rata mempunyai kepemilikan asing sebesar 37,71% pada laporan tahunan 2010 dan 2011 dan variasi proporsi kepemilikan asing berada di antara 5,214% dan 70,206%. Hasil statistik menunjukkan nilai maksimum adalah 0,93 milik PT Holcim Indonesia Tbk. pada tahun 2010 dan nilai minimum adalah 0 milik PT Alumindo Light Metal Industry Tbk., PT Indal Aluminium Industry Tbk., PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., PT Budi Acid Jaya Tbk., PT Chandra Asri Petrochemical Tbk., PT Berlina Tbk., PT Sekawan Intipratama Tbk., PT Trias Sentosa Tbk., PT Yanaprima Hastapersada Tbk., PT Fajar Surya Wisesa Tbk., PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., dan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. pada tahun 2010 dan 2011.

Hasil perhitungan statistik deskriptif atas variabel kontrol profitabilitas menunjukkan angka rata-rata sebesar 0,1474 dan standar deviasi 0,12604 yang berarti perusahaan sampel rata-rata mempunyai profitabilitas sebesar 14,74% pada laporan tahunan 2010 dan 2011 dan variasi profitabilitas berada di antara 2,136% dan 27,344%. Hasil statistik menunjukkan nilai maksimum adalah 0,70 milik PT Malindo Feedmill Tbk. pada tahun 2010 dan nilai minimum adalah 0,00 milik PT Toba Pulp Lestari Tbk. pada tahun 2010.

Hasil perhitungan statistik deskriptif atas variabel kontrol leverage menunjukkan angka rata-rata sebesar 1,1203 dan standar deviasi 0,98027 yang berarti perusahaan sampel rata-rata mempunyai leverage sebesar 112,03% pada laporan tahunan 2010 dan 2011 dan variasi *leverage* berada di antara 14,003% dan 210,057%. Hasil statistik menunjukkan nilai maksimum adalah 4,32 milik PT Alakasa Industrindo Tbk. pada tahun 2011 dan nilai minimum adalah 0,13 milik PT Sierad Produce Tbk. pada tahun 2010.

Hasil perhitungan statistik deskriptif atas variabel kontrol ukuran perusahaan menunjukkan angka rata-rata sebesar 12.1591 dan standar deviasi 0,71446 yang berarti perusahaan sampel rata-rata mempunyai aset sebesar 5,021,142,461,341 pada laporan tahunan 2010 dan 2011. Hasil statistik menunjukkan nilai maksimum adalah 13,75 milik PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. pada tahun 2011 dan nilai minimum adalah 10,89 milik PT Lionmesh Prima Tbk. pada tahun 2010.

Pengujian hipotesis menggunakan regresi berganda yaitu untuk mengukur kekuatan hubungan antara komisaris independen, komite audit, kepemilikan publik, kepemilikan asing, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengujian signifikansi koefisien dari setiap variabel bebas menggunakan *p-value* (*probability value*) dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05). Hasil uji regresi berganda dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 3. Ringkasan pengujian hipotesis penelitian ini disajikan dalam tabel 4.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji regresi**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
	B	Std. Error	Coefficients		
1 (Constant)	-1.285	0.217		-5.924	0.000
KIN	0.099	0.089	0.098	1.105	0.274
KAU	-0.027	0.028	-0.096	-0.963	0.340
PUB	-0.081	0.086	-0.094	-0.940	0.351
FOR	-0.009	0.043	-0.022	-0.217	0.829
ROE	-0.005	0.110	-0.005	-0.048	0.962
LEV	-0.052	0.013	-0.367	-4.031	0.000
SIZE	0.134	0.018	0.694	7.597	0.000

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2012

**Tabel 4**  
**Ringkasan Uji Hipotesis**

Nama Variabel	Hipotesis	Koefisien	Signifikansi	Kesimpulan Hipotesis
Komisaris Independen	1 +	0,099	0,274	Ditolak
Komite Audit	2 +	-0,027	0,340	Ditolak
Kepemilikan Publik	3 +	-0,081	0,351	Ditolak
Kepemilikan Asing	4 +	-0,009	0,829	Ditolak

Keterangan : Nilai signifikan adalah <0,05

Hasil pengujian menunjukkan komisaris independen tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Khan (2010) dan Khan *et al* (2012) bahwa komisaris independen akan memberikan tekanan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, penelitian ini mendukung penelitian Mulia (2010), Mardi (2010), Sinaga (2011), dan Ratnasari (2011) bahwa komisaris independen tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Mulia (2010) menjelaskan bahwa alasan komisaris tidak mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah kemungkinan komisaris independen kurang mempengaruhi pengambilan keputusan. Mereka tidak terlibat dalam operasional perusahaan dan tidak mempunyai kualifikasi yang memadai sebagai komisaris independen. Ini bisa terlihat dari beberapa perusahaan yang mempunyai komisaris independen dengan latar belakang non ekonomi seperti pensiunan TNI.

Hasil pengujian menunjukkan komite audit tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Khan *et al* (2012) bahwa komite audit akan memberikan tekanan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, Sinaga (2011) dan Ratnasari (2011). Sinaga (2011) memberikan alasan bahwa komite audit menjadi tidak berpengaruh karena tidak

dapat menjalankan tugas dengan semestinya dalam melakukan pengawasan bersama dengan komisaris terhadap perusahaan dengan menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan.

Koefisien yang negatif berlawanan dengan arah hipotesis yang disusun. Hal ini bisa disebabkan oleh hampir meratanya persebaran jumlah komite audit di perusahaan-perusahaan industri dasar dan kimia dengan rata-rata 3 orang komite audit tiap perusahaan. Jumlah komite audit untuk tiap tahun juga tidak berubah-ubah selama tahun 2010 dan 2011. Ini mengakibatkan jumlah pelaksanaan tanggung jawab sosial tidak akan terpengaruh dengan banyaknya komite audit walaupun jumlah pelaksanaannya berubah setiap tahun. Ini bisa terlihat dari nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,340. Kemungkinan yang terjadi adalah perusahaan-perusahaan itu hanya ingin memenuhi kriteria yang dianjurkan oleh KNKG yaitu mempunyai komite audit minimal sebanyak 3 orang.

Hasil pengujian menunjukkan kepemilikan publik tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Khan *et al* (2012) bahwa kepemilikan publik akan memberikan tekanan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan karena semakin besar kepemilikan publik maka semakin besar juga *stakeholder* perusahaan. Namun, hasil ini mendukung penelitian dari Mulia (2010) dan Sobhan dan Werner (dalam Khan, 2012). Sobhan dan Werner beralasan bahwa biasanya publik kurang mengerti tentang laporan keuangan dan hanya mencari insentif yang jelas seperti dividen sehingga banyak yang tidak datang saat rapat umum pemegang saham.

Koefisien berubah menjadi negatif dan berlawanan dengan arah hipotesis yang disusun. Hal ini bisa disebabkan karena nilai signifikansi yang besar mencapai 0,351 dan nilai proporsi kepemilikan publik yang tidak mempunyai arah yang jelas dengan luas pengungkapan tanggung jawab sosial. Kemungkinan yang terjadi adalah perusahaan industri dasar dan kimia melakukan kegiatan tanggung jawab sosial benar-benar tidak terpengaruh dengan besarnya kepemilikan publik. Ini yang menyebabkan nilai koefisien berbeda dengan hipotesis.

Hasil pengujian menunjukkan kepemilikan asing tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Khan *et al* (2012) dan Tanimoto dan Suzuki (dalam Novita *et al*, 2008) bahwa kepemilikan asing akan memberikan tekanan untuk pelaksanaan dan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Novita *et al* (2008). Novita *et al* (2008) memberikan alasan bahwa kepemilikan asing pada perusahaan di Indonesia secara umum belum mepedulikan masalah lingkungan dan sosial sebagai isu kritis yang dianjurkan untuk diungkapkan dalam laporan tahunan. Alasan lain adalah tidak ada peraturan yang menjelaskan secara rinci besarnya nilai tanggung jawab sosial yang harus dilakukan oleh perusahaan di Indonesia sehingga pihak asing tidak tertekan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Koefisien berubah menjadi negatif dan berlawanan dengan arah hipotesis yang disusun. Hal ini bisa disebabkan karena nilai signifikansi yang besar mencapai 0,829 dan nilai proporsi kepemilikan asing yang tidak mempunyai arah yang jelas dengan luas pengungkapan tanggung jawab sosial. Kemungkinan yang terjadi adalah perusahaan industri dasar dan kimia melakukan kegiatan tanggung jawab sosial benar-benar tidak terpengaruh dengan besarnya kepemilikan publik. Ini yang menyebabkan nilai koefisien berbeda dengan hipotesis.

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel-variabel independen penelitian yaitu komisaris independen, komite audit, kepemilikan publik, dan kepemilikan asing, serta variabel kontrol seperti profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang diungkapkan dalam laporan tahunan (*annual report*) perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010 dan 2011. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal yaitu (i) variabel komisaris independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan namun tidak signifikan, (ii) variabel komite audit, kepemilikan publik, dan kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan namun tidak signifikan, (iii) penelitian tentang tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia masih tidak konsisten hasilnya dengan penelitian lain, (iv) pelaksanaan struktur tata kelola perusahaan di Indonesia belum efektif dalam menyeimbangkan nilai sosial dan nilai ekonomi perusahaan.

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yaitu (i) subjektivitas pada saat *content analysis* luas pengungkapan tanggung jawab sosial sehingga kemungkinan ada beberapa pengungkapan yang tidak dinilai, (ii) sampel perusahaan sebesar 34 perusahaan. Setiap perusahaan memiliki laporan tahunan tahun 2010 dan laporan 2011 dengan total sampel penelitian yaitu 68 laporan tahunan. Jumlah sudah memenuhi persyaratan sampel minimum tetapi belum cukup untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Beberapa saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah (1) adanya *cross check* untuk mengantisipasi kelemahan dari *content analysis* agar penilaian sesuai keadaan asli, (ii) sampel penelitian sebaiknya ditambah dengan tipe industri lain yang berhubungan dengan lingkungan selain industri dasar dan kimia.

## REFERENSI

- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam dan Anis Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.



- Hadiprajitno, Paulus Theodorus Basuki. 2012. "Struktur Kepemilikan, Mekanisme Tata Kelola Perusahaan, dan Biaya Keagenan di Indonesia". *Disertasi Tidak Dipublikasikan*, Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Hendriksen, Eldon S. 2002. *Teori Akunting*. Terjemahan: Herman Wibowo, edisi kelima. Jakarta: Interaksara.
- Khan, Arifur, Mohammad Badrul Muttakin, dan Javed Shidiqui. 2012. "Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosures: Evidence from an Emerging Economy." *Springer Science+Business Media*, h.n.p, <http://www.springerlink.com>. Diakses tanggal 14 Juli 2012.
- Khan, Mohammad Habib Uz Zaman. 2010. "The Effect of Corporate Governance Elements on Corporate Social Responsibility (CSR) Reporting: Empirical Evidence from Private Commercial Banks of Bangladesh." *International Journal of Law and Management*, Vol. 52, h.82-109. Diakses tanggal 14 Maret 2012, dari Emerald Group Publishing Limited.
- Machmud, Novita dan Chaerul D. Djakman. 2008. "Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR Disclosure) pada Laporan Tahunan Perusahaan: Studi Empiris pada Perusahaan Publik yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006." *Symposium Nasional Akuntansi 11*, Vol. 2, h.n.p.
- Mardi, Aegidius. 2010. "Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Industri *High-Profile*". *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Mulia, Rizky. 2010. "Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)". *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Sinaga, Andriyati M. 2011. "Pengaruh Elemen *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Sektor Perbankan di Indonesia". *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Sembiring, Eddy Rismanda. 2005. "Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Study Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta." *Symposium Nasional Akuntansi 8*, h.. 379-395.
- Solomon, Jill. 2007. *Corporate Governance and Accountability*. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd.
- Ratnasari, Yunita. 2011. "Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di dalam *Sustainability Report*". *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Wardhani, Ratna. 2008. "Tingkat Konservatisme Akuntansi Di Indonesia Dan Hubungannya Dengan Karakteristik Dewan Sebagai Salah Satu Mekanisme *Corporate Governance*" *Symposium Nasional Akuntansi 11*.